



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGGAI**



2023

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023 merupakan ikhtisar akuntabilitas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai selama tahun 2023, atas pelaksanaan anggaran program dan kegiatan sesuai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.

Tidak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu atau terlibat dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Dan LKjIP Tahun 2023 ini juga dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai pada tahun yang akan datang. Amin

Luwuk, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian Kabupaten Banggai

LESMANA P. KULAB, S.Kom
NIP. 19810721 200312 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023 menyajikan informasi capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan kebijakan yang tepat dan terarah melalui program dan kegiatan.

Tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel, Terwujudnya Tata Kelola Statistik Sektoral Kabupaten Banggai yang Sistematis, Berkualitas dan Integratif, dan Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah. Sasaran strategisnya Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan indikator kinerja Nilai Indeks SPBE, Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi melalui portal Satu Data Banggai dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral, dan Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai melaksanakan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan yang didukung dengan alokasi APBD Kabupaten Banggai sebesar Rp.13.370.667.391. Namun, setelah mengalami perubahan pada momen pergeseran ketiga APBD Tahun Anggaran 2023, pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai mengalami ketambahan anggaran sebesar Rp.948.843.022 sehingga pagu anggaran menjadi Rp.14.319.510.413.

Berdasarkan analisis atas pencapaian sasaran kinerja utama pada tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai berhasil memperoleh Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) **3,23** dengan predikat **Baik**. Hasil ini jauh meningkat drastis jika dibandingkan dengan perolehan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 yang hanya memperoleh nilai 2,07 dengan Predikat Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Banggai termasuk sudah baik.

Nilai Indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banggai ini juga menjadi yang tertinggi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan melebihi Nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sesuai dengan konsep reformasi digital pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai tidak ingin hanya berlomba mengejar indeks SPBE supaya tinggi, tetapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai senantiasa berkomitmen untuk melakukan peningkatan kinerja implementasi SPBE dan agar bagaimana inovasi-inovasi dalam menyelenggarakan SPBE dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai lebih menekankan bagaimana *outcome*-nya kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari SPBE, yakni mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Banggai.

Untuk pencapaian atas kinerja utama kedua, Hasil Survei Indeks Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektorial Tahun 2023 menunjukan bahwa konsumen atau masyarakat pengguna data menyatakan puas terhadap kesigapan, keandalan, ketersediaan sarana, kepastian, keempatiandan seluruh pelayanan data statistik sektorial

yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan hasil survey, nilai IKK terhadap kesiapan sebesar 82,64, nilai IKK terhadap keandalan sebesar 81,41, nilai IKK terhadap ketersediaan sarana sebesar 83,33, nilai IKK terhadap kepastian sebesar 82,42, nilai IKK terhadap keempatian sebesar 86,34 dan nilai IKK terhadap pelayanan sebesar 82,91. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan data statistik sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk dalam kategori Baik.

Dan untuk capaian kinerja terakhir pada urusan persandian, berdasarkan kajian mandiri yang dilakukan oleh Bidang Persandian terhadap Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai dengan menggunakan aplikasi Indeks KAMI, diketahui bahwa Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai sudah berada pada level kematangan Tingkat I atau pada Kondisi Awal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan informasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai masih tergolong rendah. Dari kelima area keamanan informasi, tampak bahwa Pemerintah Banggai telah memiliki Pengolahan Aset dan Aspek Teknologi yang lebih baik dibanding area keamanan lainnya meskipun belum mendekati standar yang ditetapkan dalam Proses Penerapan. Sedangkan untuk Area Kerangka Kerja, Area Tata Kelola dan Area Pengelolaan Risiko tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai tergolong belum layak untuk mencapai kerangka kerja dasar. Hal ini sangat perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengamanan informasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Landasan Hukum.....	7
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	30
4.1. Simpulan Umum	30
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	31
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai (Kondisi Per 31 Desember 2023)	4
Tabel 2.1	Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai	11
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026	22
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai.....	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Laporan kinerja ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2022 merupakan ikhtisar pertanggungjawaban yang memuat secara lengkap tentang pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2022. LKjIP ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

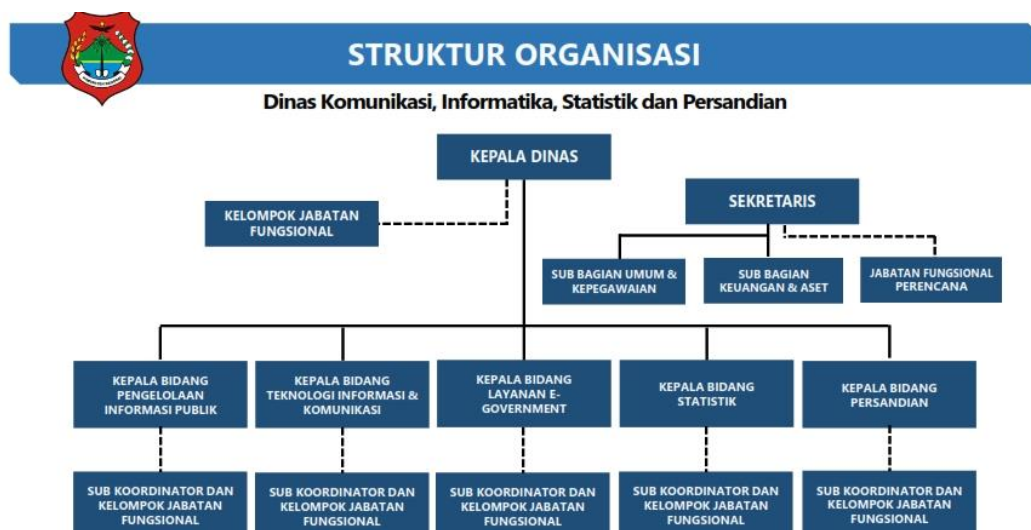
Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai perangkat daerah atau dinas baru pada tanggal 27 Desember 2016, hasil penggabungan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang serumpun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumnya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan), urusan statistik (yang sebelumnya menjadi kewenangan Bappeda) dan urusan persandian (yang sebelumnya menjadi kewenangan Bagian Humas dan Protokol Setda). Secara legal formal, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pada tanggal 29 Desember 2021 terjadi perubahan nomenklatur dinas secara legal formal dari Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Perubahan nomenklatur ini berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai terdiri atas Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government, Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/ melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan (dari Pemerintah Pusat).

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi : perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas : Kepala Dinas, Sekretariat Dinas yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; Bidang Layanan e-Government; Bidang Pengelolaan Informasi Publik; Bidang Statistik; Bidang Persandian; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Daerah Kabupaten Banggai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 40 (empat puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 33 (tiga puluh tiga) orang Tenaga Honorer. Jumlah ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terinci berdasarkan klasifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
 Data ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai (Kondisi per 31 Desember 2023)

No	Klasifikasi Berdasarkan	Jumlah (Org)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Status Pegawai			
	- PNS	40	100,00	
	- CPNS	-	0,00	
2.	Jenis Kelamin			
	- Laki-laki	21	52,50	
	- Perempuan	19	47,50	
3.	Tingkat Pendidikan			
	- SMP / sederajat	-	0,00	
	- SMA / sederajat	2	5,00	
	- D1 / D2 / D3	-	0,00	
	- S1	35	87,50	
	- S2	3	7,50	
	- S3	-	0,00	
4.	Golongan			
	- Golongan IV	8	20,00	
	- Golongan III	31	77,50	
	- Golongan II	1	2,50	
	- Golongan I	-	0,00	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DKISP Kab.Banggai

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Banggai. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian meliputi :

1. Percepatan akses broadband di wilayah blankspot. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS) dengan Kemenkominfo (BAKTI) dan melakukan survei untuk memastikan ketersediaan lahan dan titik koordinat lokasi akses broadband;
2. Peningkatan Penerapan SPBE. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Penetapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
 - Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Peningkatan Pengelolaan Pusat Data (Server)
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemda Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (Smart City)
 - Peningkatan literasi digital masyarakat
3. Peningkatan keterbukaan informasi publik. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan kapasitas dan tata kelola PPID
 - Peningkatan akses layanan informasi publik
 - Peningkatan komunikasi publik melalui kemitraan dengan komunitas komunikasi sosial
4. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan menjamin tingkat keakuratan data sektoral. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Percepatan Implementasi Satu Data
 - Pengembangan Sumber daya statistik daerah
5. Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah. Strategi ini dilaksanakan dengan arah kebijakannya sebagai berikut :
 - Penerapan tanda tangan elektronik/dokumen elektronik.
 - Pengembangan Sumber daya persandian
 - Penerapan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi

Sesuai uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain :

1. Kesenjangan digital di beberapa wilayah Kabupaten Banggai

Kesenjangan digital selalu disebabkan karena adanya ketimpangan dan ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesenjangan digital ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat di beberapa wilayah terhadap informasi dan komunikasi. Permasalahan kesenjangan digital di wilayah Kabupaten Banggai banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur TIK. Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Banggai yang berbentuk pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal juga menyebabkan jangkauan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi tidak merata.

2. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital

Pemerintah sangat menyadari peranan transformasi digital untuk Revolusi Industri 4.0, dan menjadi salah satu prioritas nasional. Untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kegiatan strategis di bidang TIK. Yang menjadi fokus utamanya adalah membangun infrastruktur digital dan memperluas jangkauan internet ke seluruh Indonesia. Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan *digital capabilities* dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti *cloud*, *data center*, *security management* dan infrastruktur *broadband*.

Untuk menghadapi era transformasi digital dan revolusi industri 4.0, literasi digital masyarakat Kabupaten Banggai perlu ditingkatkan. Literasi digital merupakan aktivitas dalam menggunakan teknologi digital, peralatan komunikasi, dan/atau jaringan untuk mengakses, mengatur, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi untuk manfaat dalam suatu kumpulan sosial.

3. Percepatan Implementasi SPBE dan SPLPD

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain. Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu sendiri adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.

4. Maraknya Hoax, Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware

Maraknya konten hoaks, konten pornografi, judi, kekerasan, SARA, malware dan konten ilegal lainnya telah memicu banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerusuhan antar suku atau agama, meningkatnya kejahatan, serta pengaruh buruk bagi masyarakat terutama anak-anak.

Kebijakan tata kelola komunikasi publik pemerintah pusat dan daerah kembali berperan besar dalam mengkonter hoaks. Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik seperti program vaksin COVID-19, Stunting, UU Cipta Kerja, dan Bangga Buatan Indonesia dapat memberikan pencerahan dan pembentukan opini yang baik bagi masyarakat di tengah maraknya gempuran hoaks yang cukup membuat stigma negatif terhadap kinerja pemerintah

5. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan informasi rahasia (*confidentiality*), menjadi kegiatan untuk mengamankan data, informasi dan aset informasi pemerintah secara keseluruhan.

6. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia

Masih belum optimalnya penyelenggaraan diseminasi data statistik sektoral dipengaruhi SDM aparatur bidang statistik yang terbatas dan belum terkoordinasinya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral pada perangkat-perangkat daerah sebagai produsen data terkait.

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN, yang menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, strategi dan arah kebijakan, isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dasar hukum penyusunan LKjIP serta sistematika penulisan LKjIP, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memaparkan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023.
- BAB IV PENUTUP, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, rencana tindak lanjut dan komitmen yang akan dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses pegawai dan atasan langsungnya secara bersama-sama menyiapkan dan menyepakati pekerjaan yang harus dilakukan pada satu tahun tertentu, menentukan sasaran kinerja dan target yang harus diukur melalui indikator kinerja, serta mengidentifikasi dan merencanakan cara mengatasi kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 serta tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Banggai saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, telah dirumuskan misi selama masa jabatan 2021-2026 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera;
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi;
3. Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana;
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan;
5. Pengembangan Pariwisata, Budaya serta Nilai Keagamaan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Dari 6 misi tersebut, fokus utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdapat pada MISI KETIGA, yaitu Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana. Tujuan misi ini adalah Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar untuk penanggulangan kemiskinan serta infrastruktur wilayah untuk ekonomi dan konektivitas wilayah.

Misi ini diarahkan pada upaya untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, utamanya infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai, secara merata dan berkualitas. Diharapkan tidak ada lagi rumah tangga yang tidak menikmati listrik, air bersih, fasilitas sanitasi lingkungan dan tidak ada lagi area *Blankspot* yang tidak terjangkau telekomunikasi, serta tidak ada lagi desa-desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi ini, maka salah satu strategi pembangunan Kabupaten Banggai yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sangat berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sampai ke pelosok desa dengan program prioritas Percepatan Banggai Smart Regency melalui Transformasi Digital. Strategi ini akan dijalankan dengan empat arah kebijakan yakni Penuntasan Masterplan Smart City / Pengembangan TIK Kabupaten Banggai; Peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK; Pembangunan infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital; dan Peningkatan literasi digital masyarakat.

Selain fokus pada misi ketiga, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga mendukung MISI KEENAM, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. Misi Keenam bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, yang akan dilaksanakan dengan tiga strategi. Pertama, Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK dengan arah kebijakan Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua, Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta penelitian dan pengembangan daerah dengan arah kebijakan Penerapan Satu Data Kabupaten Banggai dan Pengembangan *performance base budgeting* melalui integrasi perencanaan dan penganggaran daerah berbasis IT. Dan Ketiga, Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan arah kebijakan Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah

menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai

VISI : Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan lokal			
MISI III : Memperkuat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan	Percepatan akses broadband di wilayah blankspot	Fasilitasi Pembangunan BTS di wilayah blankspot. Melakukan survei untuk memastikan ketersediaan lahan dan titik koordinat lokasi akses broadband
		Peningkatan Penerapan SPBE	Penetapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
			Penatalaksanaan/ Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
			Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Peningkatan Pengelolaan Pusat Data (Server)
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis SPBE
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas (<i>Smart City</i>)
			Peningkatan literasi digital masyarakat
			Pengembangan SDM bidang TIK

		Peningkatan keterbukaan informasi publik	Peningkatan kapasitas dan tata kelola PPID
			Peningkatan layanan informasi publik
			Peningkatan komunikasi publik melalui kemitraan dengan kelompok komunikasi sosial
			Monitoring Opini dan Informasi Publik (Konter Hoaks)
Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan penyelenggaraa n persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Penetapan peraturan Bupati terkait penyelenggaran persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai
			Pengembangan Sumber daya persandian
			Penerapan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi lingkup Pemerintah Kab.Banggai
MISI VI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel			
Terwujudnya Tata Kelola Statistik Sektoral Kabupaten Banggai yang Sistematis, Berkualitas dan Integratif	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi melalui portal Satu Data Banggai	Peningkatan Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Percepatan Implementasi Satu Data
			Pengembangan Sumber daya statistik daerah

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) maupun indikator kinerja kegiatan (*input* dan *output*). Target kinerja ini yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pada Renja Tahun 2023 telah ditetapkan 5 program, 14 kegiatan dan 72 sub kegiatan sebagaimana Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.370.667.391
2.	16.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12.994.221.091
2.	16.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.036.901.721
2.	16.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			139.780.860
2.	16.	01.	2.01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	91.086.560
2.	16.	01.	2.01.	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.045.000
2.	16.	01.	2.01.	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	12.292.000
2.	16.	01.	2.01.	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.406.000
2.	16.	01.	2.01.	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.934.800
2.	16.	01.	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	3.971.500
2.	16.	01.	2.01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.045.000
2.	16.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.405.104.511
2.	16.	01.	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	1 Tahun	3.111.511.389
2.	16.	01.	2.02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tambahan penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun	2.158.203.122
2.	16.	01.	2.02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	31.360.000
2.	16.	01.	2.02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	22.158.000
2.	16.	01.	2.02.	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	26.473.000
2.	16.	01.	2.02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semester yang tersusun	13 Dokumen	31.332.000
2.	16.	01.	2.02.	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 Dokumen	24.067.000
2.	16.	01.	2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			28.670.500
2.	16.	01.	2.03.	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.172.000
2.	16.	01.	2.03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	25.498.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.	16.	01.	2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			93.663.500
2.	16.	01.	2.05.	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan	1 Unit	9,000,000
2.	16.	01.	2.05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	65.700.000
2.	16.	01.	2.05.	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.737.000
2.	16.	01.	2.05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	4 Orang	86,605,000
2.	16.	01.	2.05.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	5.616.000
2.	16.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			353.418.143
2.	16.	01.	2.01.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	11 Jenis	12.742.643
2.	16.	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan	22 Jenis	41.047.500
2.	16.	01.	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3.915.000
2.	16.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan/minuman yang dibutuhkan	1180 Dos	39.000.000
2.	16.	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan blangko Jumlah fotocopy berkas administrasi perkantoran	16 Blok 21234 Lembar	17.940.000
2.	16.	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang dibutuhkan	1440 Eks	7.200.000
2.	16.	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah	156 Kali	217.100.000
2.	16.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			586.371.255
2.	16.	01.	2.07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	11 Jenis	293.941.255
2.	16.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			783.436.854
2.	16.	01.	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang dibutuhkan	360 Lembar	6.670.000
2.	16.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan air, listrik dan internet	3 Jaringan	210.099.104
2.	16.	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan/bahan pembersih Jumlah petugas kebersihan dan penjaga malam Jumlah tenaga administrasi/PHL	19 Jenis 4 Orang 29 Orang	566.667.750
2.	16.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			646.456.098
2.	16.	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda empat/ dua yang diurus izin STNK-nya dan dipelihara secara rutin/berkala	8 Unit	53.610.098
2.	16.	01.	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	15 Unit	120.346.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.	16.	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan kantor yang direhab	5 Ruangan	472.500.000
2.	16.	02.			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			610.556.500
2.	16.	02.	2.01.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			610.556.500
2.	16.	02.	2.01.	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah laporan pengawasan lembaga penyiaran lokal Jumlah produk hukum daerah tentang LPPL yang difasilitasi	1 Dokumen 1 Dokumen	10.049.000
2.	16.	02.	2.01.	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan monitoring pengawasan informasi publik	1 Dokumen	24.882.000
2.	16.	02.	2.01.	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan informasi dan agenda prioritas komunikasi pemda	1 Dokumen	24.700.000
2.	16.	02.	2.01.	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah laporan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	101.927.500
2.	16.	02.	2.01.	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan pemda yang diliput dan dihimpun sebagai bahan informasi publik	200 Kegiatan	150.354.500
2.	16.	02.	2.01.	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi pemda yang dipublikasikan	200 Informasi	16.584.000
2.	16.	02.	2.01.	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media	1 Tahun	52.977.000
2.	16.	02.	2.01.	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang difasilitasi	10 Kelompok	53.848.500
2.	16.	02.	2.01.	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan manajemen komunikasi krisis	1 Dokumen	23.725.000
2.	16.	02.	2.01.	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan IKP	4 Orang	45.362.000
2.	16.	02.	2.01.	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah laporan komisi informasi daerah (PPID)	1 Dokumen	106.147.000
2.	16.	02.	2.01.	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah konferensi pers yang diselenggarakan	24 Kali	50.000.000
2.	16.	02.	2.01.	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung informasi dan komunikasi pemda yang diadakan	8 Unit	75.000.000
2.	16.	03.			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			4.346.762.870
2.	16.	03.	2.01.		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.578.968.190
2.	16.	03.	2.01.	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tata kelola nama domain dan sub domain pemda	1 Dokumen	18.968.190

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.	16.	01.	2.01.	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sewa webhosting pemda	12 Bulan	3.560.000.000
2.	16.	03.	2.02.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.	16.	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan e- government pemda	1 Dokumen	70.228.730
2.	16.	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	347.458.500
2.	16.	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data / data center yang dikelola	1 Unit	11.573.000
2.	16.	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan komunikasi intra pemda	1 Dokumen	35.534.000
2.	16.	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan sistem keamanan informasi sesuai tindak lanjut hasil koordinasi/sinkronisasi	1 Dokumen	17.585.000
2.	16.	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi data/ informasi elektronik	1 Dokumen	16.233.000
2.	16.	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi informatika yang diadakan/ dikembangkan	4 Aplikasi	100.822.500
2.	16.	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Rencana Induk Smart City yang dibuat	1 Dokumen	101.464.950
2.	16.	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur dasar/sarana TIK yang terbangun/ terpasang	3 Unit	31.149.000
2.	16.	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah laporan GCIO	1 Dokumen	15.980.000
2.	16.	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan monev SPBE	1 Dokumen	19.760.000
2.	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			213.663.500
2.	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			213.663.500
2.	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			213.663.500
2.	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan/ dimuktahirkan, diolah dan diseminasikan	200 Jenis Data	48.674.000
2.	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan/bimtek statistik sektoral	56 Orang	44.529.000
2.	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program Banggai Satu Data	1 Dokumen	17.775.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2.	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pemda	1 Dokumen	8.834.500
2.	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			162.782.800
2.	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			162.782.800
2.	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			124.805.800
2.	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum pemda tentang penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	56.912.300
2.	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat persandian	2 Orang	2.015.000
2.	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi pemda yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik	1 Aplikasi	27.410.000
2.	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan persandian Pemda Kabupaten Banggai	1 Dokumen	38.468.500
2.	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			37.977.000
2.	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi jaring komunikasi sandi internal pemda	1 Dokumen	37.977.000

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam dokumen LKjIP, capaian kinerja yang diukur adalah target kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan IKU. Merujuk pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 dan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023, maka telah ditetapkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2023 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan	Nilai Indeks SPBE	2,9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	610.556.500	760.708.500
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.346.762.870	4.651.483.870
	Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis 1				1.595.813.400	5.412.192.370
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi melalui Portal Satu Data Banggai	Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral	Memuaskan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	213.663.500	236.189.500
					Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis 2	
3	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat II	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	162.782.800	162.782.800
	Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis 3				162.782.800	162.782.800
4	Meningkatnya tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika,, Statistik dan Persandian yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.036.901.721	8.508.345.743
	Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis 4				8.036.901.721	8.508.345.743
Total Pagu Anggaran					13.370.667.391	14.319.510.413

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian visi misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2023 ini, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2024. Berikut ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan	Nilai Indeks SPBE	2,9 Predikat Baik	3,23 Predikat Baik
2	Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi melalui portal Satu Data Banggai	Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral	Memuaskan	Memuaskan
3	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat II	Tingkat I

Sesuai hasil pengukuran atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 diperoleh simpulan bahwa :

1. Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banggai memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar **3,23** dengan Predikat **BAIK**. Hasil ini melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yakni nilai 2,9 dengan Predikat Baik. Hasil ini jauh meningkat drastis jika dibandingkan dengan perolehan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 yang hanya memperoleh nilai 2,07 dengan Predikat Cukup.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024, Nilai Indeks SPBE yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banggai ini juga menjadi yang tertinggi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan melebihi Nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

2. Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral Tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Bidang Statistik) menunjukkan bahwa konsumen atau masyarakat pengguna data menyatakan puas terhadap kesigapan, keandalan, ketersediaan sarana, kepastian, keempatiandan seluruh pelayanan data statistik sektoral yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan hasil survey, nilai IKK terhadap kesigapan sebesar 82,64, nilai IKK terhadap keandalan sebesar 81,41, nilai IKK terhadap ketersediaan sarana sebesar 83,33, nilai IKK terhadap kepastian sebesar 82,42, nilai IKK terhadap keempatiandan sebesar 86,34 dan nilai IKK terhadap pelayanan sebesar 82,91. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan data statistik sektoral Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk dalam kategori Baik.
3. Berdasarkan kajian mandiri yang dilakukan oleh Bidang Persandian terhadap Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai dengan menggunakan aplikasi Indeks KAMI, diketahui bahwa Tingkat Keamanan

Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai sudah berada pada level kematangan Tingkat I atau pada Kondisi Awal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan informasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai masih tergolong rendah. Dari kelima area keamanan informasi, tampak bahwa Pemerintah Banggai telah memiliki Pengolahan Aset dan Aspek Teknologi yang lebih baik dibanding area keamanan lainnya meskipun belum mendekati standar yang ditetapkan dalam Proses Penerapan. Sedangkan untuk Area Kerangka Kerja, Area Tata Kelola dan Area Pengelolaan Risiko tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai tergolong belum layak untuk mencapai kerangka kerja dasar. Hal ini sangat perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengamanan informasi.

Pemerintah Kabupaten Banggai saat ini sedang melakukan upaya peningkatan keamanan data dan informasi melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik/ Tanda Tangan Digital. Hal ini sudah mulai diterapkan pada awal tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai Tahun 2023 dengan target kinerja sasaran jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi / Capaian	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan	Nilai Indeks SPBE	2,6 Predikat Baik	2,9 Predikat Baik	3,2 Predikat Baik	3,9 Predikat Sangat Baik	4,1 Predikat Sangat Baik	2,07 Predikat Cukup	3,23 Predikat Baik
Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi melalui portal Satu Data Banggai	Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral	Cukup Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	- (Belum dilakukan Survei Kebutuhan Data Tahun 2022)	Memuaskan
Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat I Kondisi Awal	Tingkat II Penerapan Kerangka Kerja Dasar	Tingkat III Terdefinisi dan Konsisten	Tingkat III Terdefinisi dan Konsisten	Tingkat IV Terkelola dan Terukur	Tingkat I Kondisi Awal	Tingkat I Kondisi Awal

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas maka dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan komitmen kuat untuk selalu melakukan perbaikan kinerja secara sistematis dan masif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dari realisasi atau capaian kinerja pada dua indikator kinerja utama.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan analisa terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja selama tahun 2023 :

1. Guna mendukung penerapan SPBE secara lebih terstruktur dan sistematis pada seluruh perangkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah berhasil membuat dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE merupakan dokumen formal kebijakan internal yang bertujuan untuk merumuskan pengelolaan dan pengembangan kebutuhan aplikasi dan infrastruktur TIK, penerapan keamanan SPBE dan manajemen aset TIK dan Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE mencakup Proses Bisnis SPBE (Tata Kelola dan Manajemen), Data, Informasi dan Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Audit TIK.
2. Untuk mendukung Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengikuti kegiatan Penilaian dan Evaluasi terhadap Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023. Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD; memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan

Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah. Penilaian terhadap Implementasi Program Smart City diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi yakni Kondisi Awal (*Baseline*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Dampak (*Impact*) dan Program Percepatan (*Quickwins*) yang akan menghasilkan Indeks Pencapaian. Dari hasil Penilaian Evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Pemerintah Kabupaten Banggai memperoleh nilai indeks Pencapaian Baseline 3,72, nilai indeks Pencapaian Output 2,34, nilai indeks Pencapaian Outcome 3,10, nilai indeks Pencapaian Impact 3,35 dan nilai indeks Pencapaian Quickwins 3,45. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi Program Smart City Pemerintah Kabupaten Banggai sudah sangat baik. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan.

3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memfasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui *video conference (vidcon)* guna mendukung Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengelolaan data dan informasi layanan SPBE pada pusat data (server) pemda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan integrasi *database* aplikasi administrasi pemerintah daerah dan aplikasi layanan publik.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengembangan aplikasi SIM Kehadiran Pegawai (e-absensi) dan pengembangan aplikasi Satu Data Banggai. Pengembangan aplikasi SIM Kehadiran Pegawai (e-absensi) dilakukan guna meningkatkan kinerja aplikasi yang dirancang guna mengelola data kehadiran/ absensi seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai. Database akumulasi kehadiran/ absensi seluruh ASN pada aplikasi ini juga digunakan sebagai ketentuan dalam mekanisme perhitungan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Sedangkan, pengembangan aplikasi Satu Data Banggai bertujuan untuk meningkatkan kinerja aplikasi dalam proses pengolahan dan penyajian data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Banggai.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pembuatan konten video profil Pemerintah Kabupaten Banggai dan konten video yang memuat program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan informasi publik.

7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengelolaan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banggai melalui beberapa platform media sosial seperti website Pemda, Youtube, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Banggai.
8. Guna meningkatkan kinerja koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersama dengan Bappeda Kabupaten Banggai, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai selaku pembina data serta seluruh perangkat daerah selaku walidata pendukung telah berhasil menggagas dan membentuk Forum Satu Data Banggai. Pembentukan Forum Satu Data Banggai ini juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan program Satu Data Banggai.
9. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dengan melakukan upaya penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik yang dipastikan akan terlaksana pada awal tahun 2023.

3.3. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan analisa terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau permasalahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dihadapi selama tahun 2023 serta alternatif solusi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

A. Analisis Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai yang berpredikat Baik dengan nilai 3,23 merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dan hampir menyamai perolehan rata-rata nilai Indeks SPBE dari seluruh pemerintah daerah kabupaten di Indonesia (416 Kabupaten) dengan nilai 3,27. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banggai telah memenuhi 8 (delapan) aspek domain SPBE yang dinilai yakni Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi,

Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Audit TIK, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Berikut ini merupakan analisis terhadap aspek-aspek yang menjadi kekuatan dalam Penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai.

- Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola, dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Banggai.
- Penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.
- Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- Pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dalam Kolaborasi Penerapan SPBE.
- Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.
- Pada Aspek Audit TIK SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan

adanya Kebijakan Internal Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai adalah dengan adanya Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
2. Survei untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen (masyarakat) pengguna data statistik sektoral telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui Bidang Statistik pada tahun 2023. Berdasarkan analisis atas Survei Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap Data Statistik Sektoral yang diselenggarakan dengan sampel 32 OPD dan 24 Kecamatan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pelayanan data statistik sektoral sudah memuaskan. Hal ini dilihat dari informasi tentang kepuasan masyarakat terhadap kesigapan pelayanan, keandalan data, ketersediaan sarana, kepastian layanan dan keseluruhan pelayanan. Variabel yang menentukan dalam kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan data statistik sektoral meliputi bagaimana sambutan petugas terhadap kedatangan konsumen, penilaian konsumen dalam hal kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan, penguasaan materi dan kemampuan petugas, kejelasan (keberadaan dan kepastian) petugas yang melayani, kesamaan pelayanan terhadap konsumen data, kedisiplinan, dan tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, serta kecepatan dalam merespon/menjawab *WhatsApp*.

B. Analisis Permasalahan Yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Walaupun sudah memperoleh Indeks SPBE 3,23 poin dengan Predikat Baik, Pemerintah Kabupaten Banggai masih memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan SPBE khususnya pada Aspek TIK, Aspek Penyelenggara SPBE, Audit TIK, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Audit TIK dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pemerintah Kabupaten Banggai masih

belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, belum adanya bukti dukung secara komprehensif terkait Kolaborasi penerapan SPBE, belum adanya bukti dukung secara komprehensif terkait penerapan manajemen risiko SPBE, belum adanya bukti dukung secara komprehensif terkait audit infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan belum melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya.

2. Terbatasnya SDM persandian dan peralatan pendukung persandian utama (APU) yang dibutuhkan mendukung pengamanan data/ informasi pemda. Selain itu, Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data/ informasi pemda belum jelas. Hal ini disebabkan belum adanya SOP terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai.

C. Beberapa Solusi Sebagai Upaya Alternatif Yang Telah Dilakukan

1. Untuk meningkatkan kinerja penerapan SPBE, khususnya pada aspek layanan publik berbasis elektronik yang tingkat kematangannya masih rendah, Pemerintah Kabupaten Banggai akan lebih menerapkan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, dan/atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Selain itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi pada indikator yang memiliki tingkat kematangan 4 agar dapat meningkat menjadi 5.
2. Peningkatan kerjasama di bidang statistik dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh perangkat daerah/produsen data. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, BPS sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
3. Berkoordinasi secara intensif dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal penggunaan metode tanda tangan elektronik. Hal ini dilakukan guna meningkatkan keamanan data dan informasi pemerintah Kabupaten Banggai.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp.13.746.563.805 atau setara dengan 96,00% dari total pagu Rp.14.319.510.413 (setelah perubahan). Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	(%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	BELANJA DAERAH	13.370.667.391	14.319.510.413	13.746.563.805	96,00
I	BELANJA OPERASI	12.780.381.136	13.512.046.658	12.946.023.805	95,81
	- Belanja Pegawai	5.182.474.511	5.154.209.133	4.785.740.737	92,85
	- Belanja Barang dan Jasa	7.597.906.625	8.357.837.525	8.160.283.068	97,64
	- Belanja Hibah	-	-	-	00,00
II	BELANJA MODAL	590.286.255	807.463.755	800.540.000	99,14
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	590.286.255	807.463.755	800.540.000	99,14

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Daerah DKISP sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp.13.746.563.805 atau 96,00% dari target yang ditetapkan yang terdiri atas Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.12.946.023.805 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.800.540.000. Komponen Belanja Operasi sendiri terealisasi melalui Belanja Pegawai sebesar Rp.4.785.740.737 (92,85% dari target yang ditetapkan) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.160.283.068 (97,64%).

Pencapaian realisasi keuangan DKISP pada tahun anggaran 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun anggaran 2022 yang sebesar 94,10%, tahun anggaran 2021 yang sebesar 93,68% dan pada tahun 2020 yang hanya sebesar 92,79%. Berdasarkan realisasi belanja daerah di atas, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan maupun penatausahaan keuangan DKISP dapat dikatakan sangat baik.

BAB IV PENUTUP

4.1. SIMPULAN UMUM

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Dari LKjIP ini dapat diketahui gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama tahun 2023 Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diperoleh simpulan bahwa :

1. Dari hasil Capaian kinerja atas sasaran strategis pertama yakni Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, dengan Indikator Indeks SPBE memperoleh **3,23** dengan Predikat **Baik**. Hasil ini melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,9 (Predikat Baik). Hasil ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan perolehan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun 2022 sebesar 2,07 dengan Predikat Cukup. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai yang senantiasa mendukung misi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Pemerintah Kabupaten Banggai di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

2. Capaian kinerja atas Sasaran Strategis kedua yakni Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi melalui portal Satu Data Banggai dengan indikator Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data Statistik Sektoral memperoleh hasil **Memuaskan**.

Hal ini tergambar dari hasil survei kepuasan konsumen/ masyarakat yang dilakukan oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menunjukkan bahwa 64% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap kesigapan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 64% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap keandalan data, 73% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap ketersediaan sarana yang diberikan, 67% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap kepastian layanan, 80% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap keempatian pelayanan, 68% konsumen/ masyarakat menyatakan puas terhadap seluruh pelayanan. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan data statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian termasuk dalam kategori Baik

3. Berdasarkan kajian mandiri yang dilakukan oleh Bidang Persandian terhadap Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai dengan menggunakan aplikasi Indeks KAMI, diketahui bahwa Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banggai masih berada pada level kematangan Tingkat I atau pada kondisi Awal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan informasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai masih tergolong rendah. Dari kelima area keamanan informasi, tampak bahwa Pemerintah Banggai telah memiliki Pengolahan Aset dan Aspek Teknologi yang lebih baik dibanding area keamanan lainnya meskipun belum mendekati standar yang ditetapkan dalam Proses Penerapan. Sedangkan untuk Area Kerangka Kerja, Area Tata Kelola dan Area Pengelolaan Risiko tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai tergolong belum layak untuk mencapai kerangka kerja dasar. Hal ini sangat perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengamanan informasi.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki dan disempurnakan pada tahun 2024. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan / kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai, perlu dilakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Banggai dan melakukan penyederhanaan proses bisnis SPBE yang terintegrasi.
2. Perlunya komitmen dan upaya yang lebih baik lagi dalam melaksanakan Survei kepuasan konsumen/ masyarakat pengguna data statistik sektoral karena survei ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik sektoral dan melihat tingkat kepuasan masyarakat dalam mencari data statistik sektoral.
3. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya pegawai secara intensif dan berkelanjutan, optimalisasi koordinasi, komunikasi dan partisipasi aktif seluruh jajaran organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih efektif dan efisien.
4. Perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan Rencana Strategis dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
5. Perlunya pengawalan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Untuk menghadapi tantangan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian ke depannya masih memerlukan upaya dan kerja keras Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apalagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditargetkan untuk dapat mewujudkan implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan kegiatan inovasi baru yang dapat ikut meningkatkan SDM aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian baik melalui diklat formal maupun pelatihan-pelatihan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mewujudkan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banggai.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, kiranya diharapkan apa yang menjadi target sasaran kinerja dapat tercapai untuk tahun berikutnya, dan akan berdampak pada peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Akhirnya kami berharap agar komitmen di atas dapat mewujudkan upaya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun mendatang. Amin